

PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM
Evie Sofiati MI, M.I.Kom

Sekretaris Dekan
Dian Marhaeni K, M.Si

Ketua Penyunting
Made Dwi Adnjani, M.Si

Sekretaris
Mubarok, M.Si

Bendahara
Parwati, SH

Dewan Penyunting
Trimanah, M.Si
Edi Ismoyo, M.Si
Suharyoso, S.Sos

Seksi Usaha
Endang Winarsih, S.Sos

Sirkulasi dan Distribusi
Novi, S.Sos

Alamat Redaksi
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam
Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe Km. 4
Po. Box 1054/SM
Semarang 50112
Telp. (024) 6583584
ext. 448/ 449
Fax. (024) 6582455
email : jurnalfikom@yahoo.co.id

Perilaku Politik Legislator Perempuan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan

Rahmi Nuraini

rahmi_bigtree@yahoo.com

105 - 115

Spasialisasi Surat Kabar Kedaulatan Rakyat

Mochamad Gifari

emgifari@ymail.com

116 - 124

Barbie Sebagai Ikon Gaya Hidup Wanita Modern

Kheyene Molekandella Boer

delux_boer@yahoo.com

125 - 131

Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space

(Geliat Weblog sebagai Online Citizen Journalism)

Filosa Gita Sukmono

filosa2009@gmail.com

132 - 139

Visit Kalbar 2010 : Program Pengelolaan Komunikasi Dalam Meningkatkan Pariwisata Daerah Kalimantan Barat

Niken Puspitasari

nikenpuspita@yahoo.com

140 - 164

Kompetensi Praktisi Pr Di Kota Semarang 2012 (Pada Badan Usaha Milik Negara)

Yanuar Luqman

yanuar@undip.ac.id

165 - 174

Pengadilan Opini Dan Efek Media Pada Perempuan Yang Terlibat Kasus Hukum

Made Dwi Adnjani

made@unissula.ac.id

175 - 182

Media Dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)

Mubarok

mubabus@gmail.com

183 - 193

Sosialita di Era Internet

Muna Madrah

munamadrah@unissula.ac.id

194 - 199



MEDIA DAN KEKERASAN BERLATAR AGAMA (URGensi PRAKTEK JURNALISME DAMAI)

Oleh :

Mubarok

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

mubgabus@gmail.com

Abstract :

Religious violence has increased from year to year. Indonesia as a country the smart approach to multicultural needs in the preaching of religious origin. During this time the media more conflict than the journalism emphasis peace journalism. So the media have contributed to the spread of violence in religion. Because it is necessary to put forward the peace journalism approach to the principle of peace in every word. The urgency of the implementation of peace journalism for multicultural as Indonesia is a requirement that the conflict is not growing. In order to practice peaceful journalism can walk properly it takes a process of dialogue between the Government, the media and the public.

Abstrak :

Kekerasan berlatar agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai negara multikultur membutuhkan pendekatan yang cerdas dalam pemberitaan berlatar agama. Selama ini media lebih banyak mengedepankan jurnalisme konflik daripada jurnalisme damai. Sehingga media berperan bagi penyebaran kekerasan berlatar agama. Karena itu diperlukan pendekatan jurnalisme damai yang mengedepankan prinsip perdamaian dalam setiap pemberitaan. Urgensi pelaksanaan jurnalisme damai bagi negara multikultur seperti Indonesia adalah keharusan agar konflik tidak semakin berkembang. Agar praktek jurnalisme damai bisa berjalan dengan semestinya dibutuhkan proses dialog antara pemerintah, media dan masyarakat.

Keywords: kekerasan, agama, jurnalisme, perdamaian

Pendahuluan

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar tersebut dibarengi dengan kemajemukan masyarakat di berbagai bidang. Kemajemukan Indonesia tidak hanya dalam bentuk kemajemukan alamiah yang timbul dari persoalan geografis, budaya, adat istiadat. Kemajemukan Indonesia juga lahir dari pluralitas agama yang dianut oleh rakyatnya. Setidaknya ada lima agama dan berbagai aliran kepercayaan yang diakui pemerintah. Kemajemukan

sejatinya bukanlah penghalang untuk bersatu. Beragam perbedaan yang dikelola dengan baik akan menjadi potensi bangsa untuk maju dan berkembang. Meski demikian fenomena kekerasan dan konflik sektarian yang terjadi menunjukkan bahwa kemajemukan bangsa ini belum dikelola dengan baik. Salah satu jenis konflik yang banyak terjadi adalah konflik berlatar belakang agama.

Data Moderate Muslim Society (MMS) mencatat ada 81 kasus intoleransi agama sepanjang 2010, naik 30 persen dari tahun 2009. Sedangkan Wahid Institute mencatat 193 kejadian diskriminasi agama dan 133 kasus intoleransi tanpa kekerasan. Naik sekitar 50 persen dari tahun lalu. Di

antara kekerasan tersebut gangguan terhadap pelaksanaan ibadah dan perusakan tempat ibadah tercatat paling banyak dilaporkan. Merujuk temuan Aliansi Kebangsaan untuk Kerukunan Beragama (AKUR), Maarif Institute memaparkan, Jawa Barat merupakan daerah yang mendominasi peristiwa kekerasan berlatar belakang agama. Hingga pertengahan September 2010 saja sudah tercatat 117 kasus, meningkat dibanding 114 kasus yang terdata hingga akhir 2009. Data Setara Institute juga menunjukkan selama kurun 2009-2010 terjadi 286 tindak kekerasan. Dari jumlah itu, 103 tindak kekerasan dilakukan elemen negara, 183 sisanya oleh elemen non-negara, termasuk ormas anarkistis¹. Human Rights Working Group (HRWG) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan berlatar agama di Indonesia. Hal tersebut mengundang banyak kecaman dari banyak negara, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Menurut catatan HRWG, terjadi 286 kasus kekerasan berlatar agama di tahun 2010. Pada tahun 2011 jumlahnya bertambah menjadi 299 kasus².

Salah satu kasus kekerasan yang menyita perhatian masyarakat adalah konflik antara Tajul Muluk dan M Rois di Sampang, Madura yang kemudian diberitakan sebagai konflik agama. Pemberitaan konflik kedua bersaudara tersebut sebagai konflik antara Suni-Syiah menimbulkan sentimen yang kuat diberbagai daerah. Muncul kemarahan dari kedua kelompok tersebut yang merasa memiliki ikatan ideologis sama. Media massa dengan gencar memberi label dan memberitakan konflik berlatar belakang asmara tersebut sebagai konflik agama.

Akibatnya sentimen antara kelompok Suni dan Syiah di berbagai daerah mengalami peningkatan. Konflik pribadi dan keluarga yang semula merupakan masalah privat ditarik dalam kepentingan publik melalui justifikasi kekerasan berlatar agama. Kemudian persoalan menjadi semakin besar ketika berbagai tokoh agama dari masing-masing aliran menganggap perlu untuk terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.

Dalam berbagai bentuk kekerasan

yang melibatkan kelompok agama, atau tokoh agama tertentu media seringkali dengan mudah menyebutnya sebagai konflik antaragama. Perilaku dari beberapa oknum yang mengatasnamakan agama kemudian di justifikasi sebagai konflik antar kelompok agama. Model pemberitaan seperti ini terjadi berulang kali sehingga kekerasan dan konflik yang semula bersifat lokal akhirnya membesar menjadi isu nasional. Fenomena ini menjadi menarik untuk mengungkap sejauh mana praktek jurnalistik menyuburkan kekerasan berlatar belakang agama dan bagaimana peran jurnalis sesungguhnya untuk mereduksi kekerasan tersebut.

Hal ini berkaitan dengan orientasi jurnalisme yang pada dasarnya bertolak pada dua sisi. *Pertama* bersifat teknis berkaitan dengan standar kelayakan berita (*newsworthy*). *Kedua* bersifat etis dengan standar normatif dalam menghadapi fakta-fakta. Hal pertama merupakan resultante dari dorongan kepentingan pragmatis khalayak dan pengelola media. Kepentingan pragmatis khalayak dapat bersifat sosial ataupun psikhis. Sementara kepentingan pragmatis pengelola media dapat dalam kaitan politis, ekonomis, ataupun kultural. Hal kedua adalah orientasi bersifat etis yang berada dalam tataran ideal normatif, yaitu cita-cita sosial yang ingin diwujudkan oleh pengelola media. Dalam lingkup masyarakat demokratis, media massa khususnya media jurnalisme menjalankan fungsi imperatif secara obyektif dalam proses yang menghubungkan warga dengan kehidupan politik, ekonomi dan kultural, sehingga warga dapat terlindungi dan penetrasi kekuasaan negara, modal dan komunalisme³.

Praktek jurnalis dalam pertarungan dua kepentingan tersebut seringkali dimenangkan oleh kepentingan pragmatis. Atas nama mengejar oplah, tiras, rating, dan nilai berita maka jurnalis dan media mengabaikan efek negatif yang muncul dari pemberitaan. Kepentingan pragmatis menjadi faktor determinan yang menentukan bagaimana sebuah peristiwa diberitakan. Sebuah kekerasan yang disebut sebagai

kejadian kekerasan sosial biasa tentu tidak menarik. Berbeda dengan sebutan “konflik antar agama” yang lebih mengaduk emosi pembaca. Membesarnya sebuah konflik dengan sendirinya menjadikan nilai berita yang dihasilkan lebih besar. Kondisi ini yang disukai oleh media termasuk dalam pemberitaan kekerasan berlatar belakang agama.

Media dan Konstruksi Kekerasan

Magnitude sebuah peristiwa sangat bergantung pada besar kecilnya dampak yang muncul dari peristiwa tersebut. Sebuah kekerasan dengan skala lokal tentu bukan kasus menarik untuk diberitakan. Karena itu diperlukan sebuah bumbu mujarab agar kekerasan memiliki magnitude yang besar. Maka justifikasi istilah untuk menyebut sebuah kekerasan akan menentukan besar kecilnya magnitude peristiwa tersebut. Media melakukan konstruksi realitas untuk menentukan bingkai pemberitaan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural pemberitaan konflik sangat rentan dengan ekses lanjutan. Pluralitas agama di Indonesia sangat bervariasi. Bahkan satu agama bisa terdiri beragam aliran yang berbeda cara pandangnya. Dalam Islam misalnya tidak hanya dikotomi Suni-Syiah tetapi masih banyak ragam lainnya. Hal ini yang membuat kekerasan berlatar agama menjadi isu yang rentan terjadi. Diperlukan kecerdasan lebih untuk memberitakan setiap konflik yang melibatkan kelompok agama.

Proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media akan menentukan label apa yang melekat pada peristiwa tersebut. Memberikan label konflik sebagai label kekerasan berlatar agama sering dilakukan media tanpa memahami akar permasalahan yang semestinya. Contohnya dalam konflik antara Tajul Muluk dan M Rois yang bermula dari masalah keluarga. Media kemudian secara besar-besaran menyebutnya sebagai konflik Suni-Syiah. Pemberian label kekerasan berlatar agama ini yang kemudian disebarkan

dan memancing sentimen agama di tempat lain. Keterlibatan media dalam menyebarkan informasi, menyebarkan gagasan, melakukan amplifikasi dari ideologi dominan memegang peran penting bagi tersebarnya doktrin kekerasan berlatar agama.

Pandangan konstruksionis dari **Peter L Berger** memandang bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus-menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil produk masyarakat. Seseorang baru menjadi pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya⁴.

Dalam pandangan **Berger** proses dialektis tersebut melalui tiga tahapan yang disebut momen. *Pertama*, eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik dalam kegiatan mental maupun fisik. *Kedua*, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai baik secara mental maupun fisik dari eksternalisasi yang telah dilakukan manusia. Eksternalisasi menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi manusia itu sendiri. Sebagai contoh adalah manusia menciptakan alat dan bahasa untuk mempermudah hidupnya. Alat maupun bahasa yang dihasilkan manusia akan mengatur bagaimana ia bekerja dan berfikir sesuai bahasa yang dihasilkannya. *Ketiga*, internalisasi yaitu proses penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi **Berger** realitas tidak dibentuk secara ilmiah tetapi ia dikonstruksi. Dengan pemahaman seperti ini realitas berarti berwajah ganda/plural. Setiap orang dapat memiliki pandangan berbeda-beda terhadap realitas yang sama.

Sebagai contoh seorang wartawan yang datang untuk meliput kekerasan di Sampang Madura tentu sudah memiliki pandangan pribadi tentang peristiwa itu. Ada yang memandang konflik tersebut sebagai

kekerasan biasa, konflik agama, pelanggaran HAM, konflik keluarga dan lainnya. Ketika sampai di Sampang Madura berbagai pandangan tersebut digunakan untuk melihat potongan peristiwa yang terjadi disana. Hasil interaksi antara pandangan wartawan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan menghasilkan berita yang tersaji di media.

Hasil konstruksi media terkadang tidak hanya menghasilkan label peristiwa tetapi bisa muncul dalam bentuk stigma pemberitaan. Stigma menurut Erving Goffman adalah jarak yang terjadi antara identitas sosial virtual dengan identitas sosial aktual. Orang yang mengalami stigma disebut terstigmatisasi. Stigma dan stigmatisasi adalah tanda yang terlihat untuk menunjukkan insider dan outsider serta memunculkan ketidakberdayaan dan ketidakadilan⁵. Stigma dikekalkan dan dikonstruksi dalam bahasa. Ketika stigma dilekatkan maka diskriminasi akan terjadi.

Dalam peristiwa kekerasan berlatar agama peristiwa ini sering terjadi. Media menyebut kelompok satu dengan yang lain menggunakan istilah tertentu. Misalnya kelompok “ikat putih” dan “ikat merah” yang dilekatkan pada kelompok yang bertikai di Ambon beberapa tahun lalu. Stigma ini menghasilkan identifikasi yang melekat dalam benak masyarakat. Mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bisa memberikan penilaian dan identifikasi berdasar stigma yang diberikan media.

Pilihan media dalam memberitakan kasus kekerasan akan menunjukkan wajah kekerasan sesungguhnya. Akan disebut apa praktik kekerasan yang terjadi sangat bergantung pada sudut pandang media yang memberitakan. Media alih-alih tampil sebagai institusi yang objektif terkadang justru berwajah ganda dengan memihak salah satu pihak. Proses ini yang membuat kekerasan berlatarbelakang agama muncul.

Kekerasan dalam bingkai masyarakat tontonan

Media dan kekerasan memiliki simbiosis kepentingan yang saling berkaitan. Konstruksi media terhadap sebuah kekerasan akan menentukan besar kecilnya magnitude peristiwa. Sementara media membutuhkan peristiwa yang bombastis dan memiliki daya tarik tinggi bagi khalayaknya. Kekerasan dan media menghasilkan sebuah harmoni kepentingan ekonomi yang menguntungkan. Kenapa tayangan dan produk kekerasan berlatar agama begitu disukai oleh khalayak?

Budaya media adalah industri budaya yang diorganisasikan pada model produksi massal dan ditujukan bagi audiens massal sesuai jenis, mengikuti formula konvensional, kode dan aturan. Budaya media menggabungkan antara budaya dan teknologi. Budaya media mendefinisikan apa yang dianggap baik dan buruk, positif atau negatif dan bermoral atau tak bermoral. Tontonan budaya media mendemonstrasikan siapa yang kuat dan lemah, dan siapa yang boleh menggunakan kekuatan dan kekerasan. Dramatisasi dan legitimasi kekuasaan digunakan untuk membuat tontonan menjadi lebih menarik.

Kondisi masyarakat seperti ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Guy Debord sebagai masyarakat tontonan (*society of spectacle*). Masyarakat tontonan adalah masyarakat yang hampir di segala aspek kehidupannya dipenuhi oleh berbagai bentuk tontonan dan menjadikannya sebagai rujukan nilai dan tujuan hidup. Selain itu, tontonan memanipulasi dan mengeksploitasi nilai-guna (use-value) dan kebutuhan manusia sebagai sarana memperbesar keuntungan dan kontrol ideologis atas manusia. Dalam masyarakat tontonan (*spectacle society*), segala sesuatu ditampilkan sebagai citra-citra yang bahkan tampak lebih real dibanding realitas sebenarnya. Inilah awal dimana tempat lahirnya masyarakat hipperrealitas (*hyperreality society*).

Konsep “masyarakat tontonan” dikembangkan oleh teoritis Prancis

bernama Guy Debord⁶. Konsep yang dikembangkan mendeskripsikan media dan masyarakat konsumen, organisasi antara produksi dan konsumsi image, komoditi dan panggung pertunjukan. Ia menggambarkan media dan masyarakat konsumen termasuk pengemasan, promosi, tampilan komoditas dan produksi serta efek dari semua media. Perkembangan tontonan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di bidang komunikasi yang mampu menyiarkan tontonan hingga pelosok dunia⁷.

Kekerasan adalah komoditi yang menjanjikan. Dalam berbagai bentuknya kekerasan bisa dibungkus menjadi komoditi yang laris manis di layar media. Kondisi ini tidak lepas dari budaya masyarakat tontonan yang menggilai citra, dan mengkonsumsinya secara berlebihan. Mereka seolah terlibat dan menonton sebuah adegan sinetron atau film laga yang menyenangkan. Maka media berlomba-lomba membungkus kekerasan dalam beragam wujud. Keindahan grafis, efek kengerian atau tulisan yang mengharu biru membungkus setiap peristiwa kekerasan agar bisa dinikmati publik. Simbiosis antara media dan masyarakat saling ketergantungan dalam menyajikan komoditas yang memenuhi selera tontonan.

Contoh praktek seperti ini sangat lazim muncul dalam bentuk *breaking news* di televisi atau rubrik khusus yang disediakan oleh pengelola media cetak. Di kanal *media online* pembaharuan berita kekerasan dilakukan dalam hitungan detik sehingga khalayak terus diminta untuk mengikuti jalannya peristiwa. Ada canda yang dilekatkan dalam setiap pemberitaan dengan beragam teknik jurnalistik yang memikat. Dalam masyarakat tontonan, kekerasan berlatar agama bisa menjadi sajian menarik yang disukai oleh para penonton.

Jurnalisme damai dalam pemberitaan kekerasan berlatar agama

Tidak dipungkiri kalau praktek jurnalisme lebih menyukai konflik daripada perdamaian. Konflik adalah peristiwa yang

memiliki nilai jual tinggi dalam berita. Praktek ini hampir terjadi di seluruh media di berbagai belahan dunia. Konflik memiliki daya tarik tersendiri untuk diliput dan diberitakan. Konflik yang besar seperti perang antarnegara di Irak, Afghanistan, Suriah menjadi magnet yang menarik jurnalis dan media dari berbagai belahan dunia untuk meliputnya. Di Indonesia media juga cenderung mengekspos dan mengulang-ulang peristiwa kekerasan sehingga memancing emosi dan menular ke daerah lain.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak yang mempertanyakan urgensi praktek jurnalisme untuk mendorong kemaslahatan kehidupan manusia. Jurnalisme alih-alih dipandang sebagai praktek yang bermanfaat dan bermartabat justru digunakan untuk menebar kebencian dan memperkeruh permusuhan. Kegelisahan ini menggugah munculnya sebuah paham yang disebut jurnalisme damai. Salah seorang pencetus dari gagasan tersebut Jake Lynch menyatakan:

“Peace journalism is when editors and reporters make choices – about what to report, and how to report it – that create opportunities for society at large to consider and to value non-violent responses to conflict. Peace journalism is more realistic, in the sense of fidelity to a reality that already exists, independently of our knowledge or representation of it. To report violence without background or context is to misrepresent it, since any conflict is, at root, a relationship, of parties setting and pursuing incompatible goals. To omit any discussion of them is a distortion”⁸.

Jurnalisme damai bukan barang baru. Pendekatan kerja jurnalis ini digagas oleh Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan, pada 1970-an. Galtung merasa “miris” melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih: kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini dia sebut sebagai jurnalisme perang. Jurnalisme perang lebih tertarik pada konflik, kekerasan, korban yang tewas, dan kerusakan material. Pola seperti ini juga yang

banyak dianut *infotainment*, yang lebih suka mendasarkan kerjanya pada konflik rumah tangga selebritis⁹.

Fenomena konflik dan pemberitaan di media selama ini, serta catatan dari acara tersebut telah memberikan peringatan penting bagi media massa di Indonesia. Media massa perlu mencoba dengan serius dan penuh komitmen untuk menyediakan berita kepada masyarakat dalam cara yang layak dan berbeda, daripada sekedar mendramatisir keadaan dan berakhir tanpa pesan yang jelas, selain kekerasan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.

Jurnalisme damai yang muncul sebagai alternatif dari jurnalisme konflik menawarkan sebuah formula jurnalisme yang berbeda. Pemberitaan media tidak diarahkan untuk memperbesar konflik atau menikmati keuntungan dari besarnya nilai berita melainkan diarahkan untuk meningkatkan empati dan mendorong perdamaian. Jurnalis dan media harus memilih materi yang akan diliput dan bagaimana sebuah peristiwa harus diberitakan. Tujuannya untuk mendorong masyarakat agar mengenyampingkan kekerasan sebagai jalan keluar penyelesaian masalah.

Dalam pemberitaan kekerasan berlatar agama, praktek jurnalisme damai adalah oase di tengah hingar bingar kepentingan ekonomi dan politik media. Sebuah pilihan yang dianggap tidak populer dan bahkan sering bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan politik media. Dalam praktek jurnalisme damai diperlukan sebuah kecerdasan emosional dan empati yang mampu diterjemahkan dalam bahasa jurnalistik. Bukan sekedar memenuhi kaidah kepenulisan jurnalistik melainkan sesuai dengan kaidah dan semangat perdamaian.

Untuk itu, penting untuk mendorong media massa yang dapat mengemas berita lewat perspektif perdamaian daripada perang, terutama dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Media massa bisa lebih kreatif dan berinisiatif untuk menyuguhkan tayangan terkait

sisi kemanusiaan, *good practices* dalam penanganan konflik lokal, termasuk diantaranya pemulihan korban, pemeliharaan perdamaian, maupun inisiatif perdamaian dari kearifan lokal maupun kebijakan pemerintah. Dengan demikian, media massa dapat ikut berperan lewat tayangan-tayangan yang informatif dan mendidik dalam upaya menggugah kesadaran akan kebhinekaan di masyarakat dan pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta mengutamakan dialog dan mencegah kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah¹⁰.

Tantangan Jurnalisme Damai

Kekerasan berlatar agama tidak berhenti pada tataran fisik belaka. Konflik ini dilatarbelakangi masalah ideologis yang kuat. Pemberitaan konflik menjadi tantangan tersendiri bagi praktek jurnalisme damai di Indonesia. Berkaca pada sejarah pers di Indonesia selama masa orde baru pers dilarang meliput SARA, sehingga praktis pers kita menjadi gagap ketika harus meliput SARA. Ada kecenderungan untuk memberitakan semua atas nama kebebasan pers. Kran kebebasan pers dianggap sebagai kemenangan praktek jurnalisme untuk menyebarkan semua peristiwa kepada publik. Media massa tumbuh bak cendawan di musim hujan membanjiri wilayah publik dengan beragam berita konflik dan kekerasan yang terus terjadi. Pers kita dianggap penuh dengan tetesan darah ketika memberitakan peristiwa konflik. Kondisi inilah yang saat ini terjadi sekaligus tantangan praktek jurnalisme damai di Indonesia.

Tantangan praktek jurnalisme damai di Indonesia datang dari berbagai arah. Media tidak hanya dihadapkan tantangan dari luar tetapi juga dari internal media. Apa yang disajikan media, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996), menyusun berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan¹¹. Mereka

mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam menentukan isi media yaitu:

1. **Faktor individual.** Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, atau agama, dan sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Latar belakang pendidikan, atau kecenderungan orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa mempengaruhi profesionalisme dalam pemberitaan media.

Dalam praktek jurnalisme damai tidak hanya dibutuhkan seorang jurnalis yang bisa membuat produk berita sesuai kaidah penulisan jurnalistik. Disini lebih dibutuhkan seorang jurnalis yang mampu membuat pilihan-pilihan pemberitaan yang mengarah pada perdamaian bukan semata mengejar target popularitas berita. Praktek seperti ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan dalam memandang dan menuliskan sebuah peristiwa melainkan lebih dari itu membutuhkan hati yang peka dan penuh empati dalam memandang setiap konflik.

Prasyarat jurnalis seperti ini tidak mudah ditemukan dalam praktek kerja media yang selalu bergelut pada tuntutan *news worthines* dan target keterbacaan berita yang berkaitan dengan rating, oplah dan pendekatan ekonomi lainnya. Di kalangan jurnalis sendiri sering dipicu kompetisi yang menantang mereka untuk memberikan pemberitaan terbaik, teraktual dan aspek keterbacaan berita. Ada suatu kebanggaan yang muncul ketika berita yang mereka buat mampu menjadi *headline* dan mendapatkan reward dari atasan. Cara pikir seperti ini sering menggiring jurnalis untuk mengenyampingkan nalar dan empati dalam melihat sebuah konflik. Alih-

alih mendorong penyelesaian konflik, yang terjadi justru sebuah kesenangan ketika konflik semakin besar. Artinya ada *magnitude* peristiwa yang akan membuat nilai berita semakin besar.

2. **Rutinitas media,** berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya.

Praktek kerja media yang bersifat rutin menggiring awak media menuju zona nyaman yang membuat tumpulnya empati, kreatifitas dan kemerdekaan dalam berfikir. Awak media sering hanya memenuhi pola kerja yang ditentukan sehingga enggan untuk bekerja lebih dari yang semestinya.

3. **Organisasi.** Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan

agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita.

Praktek tarik menarik kepentingan dengan bagian sirkulasi dan iklan sering terjadi di berbagai media. Kekerasan adalah materi berita yang menjual, meningkatkan rating dan pada akhirnya menghasilkan banyak iklan. Tentu saja bagian iklan akan memilih berita jenis ini daripada berita damai yang lebih sulit dijual.

4. Ekstra media. Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar organisasi media ini sedikit banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media:

- Sumber berita. Sumber berita di sini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan: memenangkan opini publik, atau memberi citra tertentu kepada khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita tentu memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. Kepentingan sumber berita ini sering kali tidak disadari oleh media.
- Sumber penghasilan media, berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan/pembeli media. Media harus survive, dan untuk bertahan hidup kadangkala

media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya media tertentu tidak memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. Pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. Ia tentu saja ingin kepentingannya dipenuhi, itu dilakukan di antaranya dengan cara memaksa media mengembargo berita yang buruk bagi mereka. Pelanggan dalam banyak hal juga ikut mewarnai pemberitaan media. Tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan terus-menerus diliput oleh media. Media tidak akan menyia-nyiaikan momentum peristiwa yang disenangi oleh khalayak.

- Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media (baca teori normatif komunikasi massa, dan teori makro). Dalam negara yang otoriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Keadaan ini tentu saja berbeda di negara yang demokratis dan menganut liberalisme. Campur tangan negara praktis tidak ada, justru pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis.

5. Ideologi, diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.

Solusi

Jurnalisme damai adalah jalan yang harus dipilih ketika media ingin berperan

dalam proses perdamaian. Meski demikian praktiknya menghadapi beragam tantangan. Oleh karena itu ada beberapa konsep yang bisa dijadikan rujukan terkait dengan pemberitaan media dan keamanan nasional. Graber, 2004 mengajukan tiga konsep berkaitan dengan pemberitaan peristiwa yang menyangkut keamanan nasional. Konsep ini menjelaskan hubungan antara media dan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut. Ketiga konsep tersebut adalah, *the formal censorship, the free press approach, and the informal censorship approach*¹².

1. *The formal censorship*

Pemerintah menentukan materi berita yang boleh dipublikasikan oleh media. Bentuk sensor ini sarat muatan ideologis dan kepentingan dari penguasa. Berkaitan dengan isu keamanan nasional, pemerintah berhak menentukan materi pemberitaan media. Bentuk sensor diwujudkan dalam undang-undang, peraturan, pengawasan langsung dari aparat pemerintah.

Model ini pernah dipraktikkan di masa orde baru ketika pers berada pada periode tiarap. Kebebasan pers tidak terjadi dan demokratisasi tidak berkembang. Beragam konflik dan kekerasan yang terjadi tidak bisa diselesaikan melalui diskusi yang berimbang karena kekuatan negara lebih besar dalam mengontrol kehidupan masyarakat. Praktek jurnalisme nyaris tidak berkembang dan sekedar menjadi kepanjangan suara pemerintah yang berkuasa.

2. *The free press approach*

Jurnalis dan media diberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa batasan ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pemerintah tidak melakukan sensor dalam bentuk apapun. Audiens dianggap sudah cerdas dan mampu memilah isi pemberitaan sehingga tidak membahayakan keamanan nasional.

Kondisi ini yang nampaknya sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kebebasan pers menampilkan wajah yang menyeramkan,

alih-alih menjadi sarana kemaslahatan bangsa pers justru dituding sebagai biang dari membesarnya berbagai kasus kekerasan. Atas nama kebebasan pers semua peristiwa boleh diberitakan dengan model dan bingkai sesuai kehendak media. Masyarakat yang majemuk dari beragam sisi termasuk tingkat pendidikan dan kecerdasan dianggap bisa memilah berita dengan baik. Prasyarat kecerdasan masyarakat inilah yang kurang dipertimbangkan oleh media.

3. *The informal censorship approach*

Pemerintah tidak melakukan sensor secara formal dalam bentuk apapun. Media diberikan ruang dan kebebasan untuk memberitakan isu yang terkait keamanan nasional. Pihak internal media memiliki batasan dan tanggungjawab moral kepada masyarakat dalam menentukan materi berita. Pemerintah mengembangkan diskusi yang sehat dengan media dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Dalam praktek jurnalisme di Indonesia model ketiga lebih sesuai. Kepentingan untuk menjaga kebebasan pers dan independensi pemberitaan dibarengi dengan kedewasaan pers. Proses diskusi antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi syarat agar jurnalisme damai bisa berjalan. Proses diskusi ini semestinya digelar rutin dan menjadi rekomendasi pers sebelum menurunkan berita. Alangkah baiknya jika pers bersedia menunda sejenak hasrat untuk menilai sebuah peristiwa kekerasan dan mengembangkan dialog sehingga kekerasan bisa diberitakan dengan prinsip jurnalisme damai.

Simpulan

1. Media tentu bukan satu-satunya pihak yang bisa disalahkan dari munculnya kekerasan berlatar agama. Meski demikian konstruksi yang mereka kembangkan dalam pemberitaan kekerasan berlatar agama akan menentukan seberapa besar konflik tersebut berkembang. Setidaknya

- dengan pemberitaan yang mengedepankan praktek jurnalisme damai media dapat memberikan sumbangan bagi resolusi konflik yang terjadi. Dalam tataran minimal media tidak menjadi pihak yang justru memperbesar skala kekerasan berlatar agama.
2. Tantangan dalam praktek jurnalisme damai bisa dihadapi dengan mengedepankan pendekatan *the informal censorship approach* yang mengepankan proses dialog antara pemerintah, media dan masyarakat.
 3. Jurnalisme damai membutuhkan pratisi yang memahami prinsip dan urgensi praktek. Karena itu pengelola media perlu memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi tumbuhnya minat dan kesadaran dari awak media. Dorongan dan dukungan sangat dibutuhkan dengan semangat untuk membangun perdamaian.
 4. Pada tataran praktis setiap media perlu membuat panduan peliputan yang sehat dan mendukung praktek jurnalisme damai. Media perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah dan membuka kran dialog dengan masyarakat untuk membangun praktek jurnalisme damai.
 5. Pemerintah perlu secara konsisten menaruh kepedulian pada praktek jurnalisme damai mengingat besarnya potensi konflik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agus Sudiby, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKis.
- Alex Sobur, 2002, *Analisis Teks Media*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Croteau, David and Hoynes, William, 2000, *Media Society, Second edition*, California: Sage Publications.
- Curran, James, Gurevitch, Michael, 1991,

Mass Media and Society, New York: Routledge Chapman Hall inc

- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing*, Yogyakarta: Lkis
- Kellner, Douglas, 1995, *Media Culture, Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern*, New York: Routledge
- Littlejohn, Stephen W, 1996, *Theories of Human Communication, Fifth Edition*, Belmont California: Wadsworth Publishing Company
- Shoemaker, Pamela J. dan Reese, Stephen D, (1996), *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, New York: Longman Publishers
- Mubarok, Madrah Muna, 2012, *Stigma Media dan Terorisme*, Aceh: Bandar Publishing
- Jurnal
- Mubarok, *Posisi Media Dalam Perang Melawan Terorisme*, 2012, Proseding Seminar Nasional Komunikasi Militer 2012, Yogyakarta: UPN Veteran
- Mubarok, 2011, *Korupsi Dalam Masyarakat Tontonan*, Jurnal Interaktif ilmu-Ilmu Sosial, Malang: Universitas Brawijaya, Malang, Vol.4 Februari 2011
- Artikel Internet

Siregar, Ashadi, 2001, *Jurnalisme Perdamaian, Resolusi Konflik Sosial*, <http://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/jurnalisme-perdamaian-resolusi-konflik.pdf>

Stanley, 2001, *Konflik dan Ide Jurnalisme Perdamaian*, Materi Seminar Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Perdamaian, Medan: Yayasan Kippas

(Endnotes)

- 1 <http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/20/137447/Kalahnya-Negara-atas-Kekerasan-Berlatar-Agama>
- 2 <http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?>

- [e=6256](#), 6/11/2012
- 3 Ashadi Siregar, Disampaikan pada Seminar Pers Menyikapi Konflik Kekuasaan, Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS), Surabaya 8 Februari 2001
 - 4 Eriyanto, 2002:13
 - 5 Mubarok, Madrah Muna, 2012, Stigma Media dan Terorisme, Aceh: Bandar Publishing hal 43
 - 6 "The Society Of The Spectacle" ditulis oleh Guy Debord, versi pdf dapat diperoleh secara online melalui <http://treason.metadns.cx>, TREASON PRESSGPO Box 2427 Canberra ACT 2601 canberratreason@yahoo.com.au.
 - 7 Mubarok, Korupsi Dalam Masyarakat Tontonan, Jurnal Interaktif ilmu-Ilmu Sosial Universitas Brawijaya, Malang, Vol.4 Februari 2011
 - 8 <http://www.transcend.org/tms/about-peace-journalism/1-what-is-peace-journalism/>
 - 9 <http://rumakom.wordpress.com/2008/01/19/prinsip-kerja-jurnalisme-damai/>
 - 10 <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/adinda-tenriangke-muchtar-/192-mendorong-jurnalisme-damai->
 - 11 dalam *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content (1996)*
 - 12 AlKarni, 2005:4, Mubarok, 2012, Proseding Seminar nasional Komunikasi Militer 2012 hal: